

SKRIPSI

KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
(STUDI KASUS: KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN
SINJAI)

NUR RIZKAH. S

E211 12 021



DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRAK

Nur Rizkah. S (E211 12 021), Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Studi Kasus: Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai) + Dibimbing oleh: Moh. Thahir Haning dan Gita Susanti

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dilihat dari segi efisiensi dan efektivitas pada kasus kekerasan seksual di kabupaten Sinjai.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Unit analisis adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sinjai. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sinjai

Hasil Penelitian terhadap kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilihat dari segi efisiensi bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugas nya sudah efisien karena seluruh kasus kekerasan seksual sudah diselesaikan dengan memenuhi target penyelesaian kasus dengan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum. Kemudian dilihat dari efektivitas terbagi atas dua indikator yaitu program dari P2TP2A kabupaten Sinjai selama kurun waktu terbentuk sudah menjalankan program kerja dengan efektif. Dapat dilihat dari sosialisasi undang- undang yang telah diberikan ke masyarakat, dan workshop ke sekolah- sekolah. Kemudian peran P2TP2A terhadap kasus kekerasan seksual belum berjalan efektif dilihat dari sosialisasi undang- undang di masyarakat dan sekolah- sekolah belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan kecenderungan sosialisasi P2TP2A yang tidak merata dan terpusat di daerah perkotaannya saja.

Kata Kunci: Kinerja, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kekerasan Seksual



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Nur Rizkah. S (E211 12 021), Performance Integrated Services Center for Women and Children (P2TP2A) (Case Study: Sexual Violence in Sinjai) + Supervised by: Moh. Tahir Haning and Gita Susanti

The goal of this research is to analyze the performance of the Integrated Service Center for Women and Children (P2TP2A) in terms of efficiency and effectiveness in cases of sexual violence in the district of Sinjai

The method used is qualitative descriptive. The unit of analysis is the Integrated Service Center for Women and Children Sinjai. Data collected consist of primary data and secondary data. By using descriptive qualitative method by using the technique of collecting data through interviews with informants were deemed potentially to provide information about how the performance of Integrated Services Center for Women and Children Sinjai

Research on the performance of the Integrated Service Center for Women and Children in terms of efficiency that the Centre waitress Integrated Empowerment of Women and Children in carrying out its already efficient because all sexual assault cases have been resolved by meeting the target resolution of cases by providing social rehabilitation services, health care, and legal assistance. Then, seen from the effectiveness divided into two indicators of program P2TP2A Sinjai district during the period established has implemented the program of work effectively. Can be seen from the socialization of legislation that has been given to the public, and workshops to schools. Then P2TP2A role in cases of sexual violence had not been effective views of the socialization of law in society and schools have not performed optimally. This is due to the tendency of socialization P2TP2A uneven and concentrated in urban areas only.

Kata Kunci: Performance, Empowerment of Women and Children, Sexual Violence



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Rizkah. S

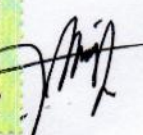
NIM : E211 12 021

Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) (STUDI KASUS: KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SINJAI) benar- benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Makassar, 15 Juni 2016




Nur Rizkah. S
E211 12 021



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nur Rizkah. S
NIM : E211 12 021
Program Studi : Administrasi Negara
Judul skripsi : Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)
(Studi Kasus: Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai)

Telah disetujui oleh pembimbing dan diketahui oleh pimpinan Departemen Ilmu Administrasi, sehingga layak untuk diajukan ke sidang ujian skripsi sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 26 Mei 2016

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Moh. Thahir Haning, M. Si
NIP. 19570507 198403 1 002

Dr. Hj. Gita Susanti, M.Si
NIP. 19650314 199103 2 001

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Administrasi



Dr. Hj. Hasnati, S.Sos., M.Si
NIP. 19680101 199702 2 001



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

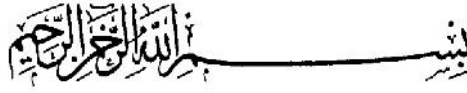
Nama : Nur Rizkah. S
NPM : E211 12 021
Program Studi : Administrasi Negara
Judul Tugas Karya Akhir : Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Studi Kasus:
Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai)

Telah dipertahankan dihadapan sidang penguji skripsi Program Studi
Administrasi Negara Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin, pada hari Senin 28 Juni 2016.

Dosen Penguji Skripsi

	Nama Penguji	Tanda Tangan
Ketua Sidang	: Dr. H. Moh. Thahir Haning, M. Si	(.....)
Sekretaris Sidang	: Dr. Hj. Gita Susanti, M.Si	(.....)
Anggota	: 1. Dr. Hj. Hasniati, M.Si	(.....)
	2. Drs. H. Nurdin Nara, M. Si	(.....)
	3. Dr. La Tamba, M. Si	(.....)

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, puji syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dengan judul *“Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Studi Kasus: Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai “ Salam dan shalawat atas junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang seperti saat ini.*

Skripsi ini merupakan salah satu karya ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sebagai wahana untuk melatih diri dan mengembangkan wawasan berpikir. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan, namun dengan adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga hambatan yang ada dapat dilalui dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa-doa yang selama ini telah dipanjatkan untuk penulis, serta jasa-jasa yang tidak terhingga, terutama terima kasih kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta **Selle, S.Pd.I** dan ibunda **Hasnah, S.Sos** Terima kasih atas doa-doa yang tidak ada hentinya serta bantuan, dukungan dan kasih sayang yang terus diberikan serta dukungan moral dan material yang telah diberikan untuk ananda selama ini.

Pada kesempatan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin dan Staf.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Staf.
3. Ibu Dr. Hj. Hasniati, S.Sos, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin dan Bapak Drs. Nelman Edy, M. Si selaku Sekertaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. H. Moh. Thahir Haning, M. Si selaku pembimbing I serta Ibu Dr. Hj. Gita Susanti, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Hasniati, S.Sos, M.Si, Bapak Drs. H. Nurdin Nara, M. Si, dan Bapak Drs. La tamba, M. Si selaku dosen penguji dalam sidang skripsi penulis. Terima kasih penulis ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam disang skripsi penulis beserta masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh pegawai di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf Akademik FISIP UNHAS dan seluruh staf Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS (Kak Ros, Kak Aci', Pak Lili, Kak Wahyu, Kak Amril dan Ibu Ani) yang telah banyak membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama penulis kuliah.

8. Terima Kasih kepada anggota PKP, Mian, Lili', Risma, Maryam, Uci', Kak kemenk, Kak Nini yang telah menemani dan bantuannya selama ini.
9. Terima Kasih kepada sahabat Nanda Sukma Dewi, Wenny Andita, Mariana, Ifva Marry Sandy, Resky Amalia, Gusti Ayu Astuti, Nurlela, teman seperjuangan selama proses perkuliahan di kampus ini. Dan teman-teman KKN Gel 90 yang telah memberikan semangat dan pengalaman-pengalaman yang tidak akan terlupakan sejak KKN hingga saat ini.
10. Terima Kasih kepada teman-teman RELASI 2012 yang tidak dapat dituliskan satu per satu atas segala bantuan dan perhatian kalian selama perkuliahan, semoga kebersamaan yang terjalin selama ini tetap ada, dan cita-cita kita bersama dapat tercapai. Sukses untuk kita semua.
11. Terima Kasih kepada sahabat- sahabat saya di One Vision, Andry, Julianto, Ali, Fahri, Amril, Takdir, Putra. Dhita yang telah banyak memberikan gesekan motivasi, pelajaran bermanfaat kepada penulis.
12. Serta sahabat dan teman-teman Penulis tanpa terkecuali, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.

Serta semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak sempat penulis sebutkan, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 15 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah.....	8
I.3. Tujuan Penulisan.....	8
I.4. Manfaat Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
II.1. Konsep Kinerja	10
II.1.1 Pengertian Kinerja....	10
II.1.2 Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja.....	16
II.1.3 Pengukuran Kinerja.....	21
II.1.4 Indikator Kinerja.....	26
II.2 Konsep organisasi.....	26
II.2.1 Pengertian Organisasi.....	26
II.2.2 Pengertian Kinerja organisasi.....	27
II.2.3 Penilaian Kinerja Organisasi.....	28
II.2.4 Pengertian, tujuan, dan fungsi Pusat Pelayanan	

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	30
II.3 Pengertian Kekerasan Seksual.....	33
II.4 Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
III.1 Pendekatan Penelitian.....	39
III.2 Lokasi Penelitian.....	40
III.3 Tipe dan Dasar Penelitian.....	40
III.4. Unit Analisis.....	40
III.5 Informan Penelitian.....	40
III.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
III.7 Teknik Analisis Data.....	42
III.8 Fokus Penelitian.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
IV.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sinjai.....	44
IV.1.1.1 Kondisi Geografis.....	44
IV.1.1.2 Kependudukan.....	45
IV.1.2 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan	
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sinjai..	46
IV.1.2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Motto P2TP2A	
Kabupaten Sinjai.....	46
IV.1.2.2 Tugas dan Fungsi P2TP2A Kabupaten Sinjai..	47
IV.1.2.3 Standar Operasional Prosedur Pelayanan	
Penanganan Pengaduan Pada Pusat Pelayanan	
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	
(P2TP2A) Kabupaten Sinjai.....	50
IV.1.2.4. Standar Pelayanan Publik (SPP)	63
IV.1.2.5 Susunan Organisasi P2TP2A.....	66
IV.2 Hasil dan Pembahasan.....	67

IV.2.1 Hasil Penelitian.....	67
BAB V PENUTUP.....	82
V.1 Kesimpulan.....	82
V.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1.....	38
------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	5
Tabel 4.1 Data Kepegawaian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	66
Tabel 4.2 Rekapitulasi Formulir Register Pelayanan Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2013.....	67
Tabel 4.3 Rekapitulasi Formulir Register Pelayanan Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2014.....	68
Tabel 4.4 Rekapitulasi Formulir Register Pelayanan Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2015.....	69
Tabel 4.5 Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi beratnya persaingan seharusnya Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dari dulu karena hanya sumber daya manusia yang handal dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi Negara berkembang seperti Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari era globalisasi sekarang ini. Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor internal yang memegang peranan penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan sehingga perlu di arahkan melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan suatu instansi atau organisasi, baik itu Instansi Pemerintahan maupun swasta sangat diperlukan peranan yang berupa kinerja dari pegawai, karena pegawai sangat menentukan tercapai atau tidaknya dari tujuan organisasi tersebut. Sesuai dengan peranan dari pegawai, maka di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang tertuang dalam pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era globalisasi, sebagai organisasi yang maju dituntut mampu untuk menyesuaikan diri serta terus melakukan perubahan-perubahan yang terjadi.

Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan dari kinerja para pegawainya yang mampu melaksanakan dan menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif dan profesional. Semua ini bertujuan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi.

Kinerja (*performance*) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian komitmen dan dukungan pimpinan puncak dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama. Bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen tersebut dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal utama untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Menentukan tingkat prestasi melalui indikator kinerjanya akan menyentuh langsung faktor-faktor yang menunjukkan indikasi-indikasi obyektif terhadap pelaksanaan fungsi/tugas seorang Aparatur, serta sejauhmana fungsi dan tugas yang dilakukan memenuhi standar yang ditentukan. (Sumber: www.lakip.do.am/blog/indikator-kinerja-utama-iku/2010-11-12-2)

Kinerja seorang individu (pegawai) merupakan awal yang penting demi terciptanya kinerja organisasi. Organisasi tidak akan dapat berfungsi dengan baik tanpa sumber daya manusia (SDM). Pegawai juga memiliki fungsi sebagai perencana, pelaksana, dan juga pengendali yang berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Konsep kinerja (*Performance*) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau *degree of accomplishment* (Rue dan byars, 1981 dalam Keban 1995). Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa Raison d'être dari suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memerlukan keindahan, baik yang melekat pada dirinya maupun pada alam sekitarnya, dan persepsi setiap manusia yang berkaitan dengan keindahan berbeda antara manusia satu dengan manusia lainnya. Proses mempersepsikan suatu keindahan tentunya diawali dengan pemahaman, merasakan dan menikmati keindahan itu. Oleh Karena itu, untuk menciptakan daya tarik organisasi kita senantiasa memelihara keindahan dan keramahan dalam organisasi tersebut. Sebuah organisasi atau lembaga juga berperan penting dalam mengatasi atau mengurangi terjadinya sebuah kasus termasuk kasus Kekerasan Seksual. Dalam hal ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sebuah Lembaga yang mewadahi penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, peyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi

kesehatan, rehabilitasi social, reintegrasi social dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Dewasa ini masalah kekerasan terhadap perempuan semakin mengemuka dengan semakin menguatnya upaya yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan *gender*. Kekerasan terhadap perempuan sering kali disebut sebagai kekerasan berbasis *gender* karena hal ini berawal dari subordinasi perempuan di masyarakat dan superioritas laki- laki. Situasi dan kondisi perempuan dengan laki- laki harus didahulukan, diprioritaskan dan diistimewakan. Terbentuklah budaya patriarkhi yang kuat dimana laki- laki yang mendominasi struktur keluarga yang mana perempuan secara historis dilihat sebagai seorang yang tidak mampu menangani urusannya sendiri tanpa kepemimpinan.

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan PBB tahun 1993, menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang- wenang, baik yang terjadi di ranah kehidupan privat atau pribadi. Bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis dapat terjadi di dalam keluarga ataupun komunitas, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan perkawinan, kekerasan yang

dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.

Demikian halnya dengan anak, banyak terjadi kasus- kasus kekerasan terhadap anak. Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, social dan budaya, serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak- hak dasarnya harus segera dihentikan.

Data kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sinjai berdasarkan data awal yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai berikut :

Tabel 1. 1

No	Jenis kasus	2013	2014	2015
1	Kekerasan Seksual	3	4	13
2	Penganiayaan	14	19	2
3	Pencurian	3	-	-
4	Pengrusakan	2	1	-
5	KDRT	5	3	-
7	Pengancaman	9	7	-
8	Penyerobotan tanah	1	-	-
9	Pencemaran nama baik	1	4	1
10	Penggelapan	2	-	-
11	Penipuan	5	-	-
12	Pengeroyokan	3	8	1

Tabel.1.1 (Sumber P2TP2A Kab. Sinjai 2013,2014,2015)

Berdasarkan tabel I.1 diatas,dapat diketahui bahwa kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di Kabupaten Sinjai merupakan kasus yang tertinggi sampai pada tahun 2015.

Kekerasan Seksual merupakan kejahatan yang telah ada sejak dahulu dan sampai sekarang pun masih menjadi kejahatan yang menyelimuti keberadaan manusia di Indonesia. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik (O'Barnett et al., dalam Matlin, 2008). Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Kejahatan ini mempunyai pengaruh yang luar biasa bukan saja pada pelaku dan korban kejahatan, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas.

Hal ini semakin ironis ketika yang menjadi korban Kekerasan Seksual tidak hanya orang dewasa, tetapi anak dibawah umur juga sering menjadi korban kekerasan ini. Anak sebagai generasi penerus pembangunan dan penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa ketika mengalami Kekerasan Seksual kemungkinan besar akan menyebabkan ia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama mitra lembaga penyedia layanan mendorong Negara mengambil langkah strategis untuk melakukan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, berkesinambungan dan holistik terhadap perempuan korban Kekerasan Seksual. Langkah strategis itu perlu diwujudkan antara lain melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, sebagaimana tercermin dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (www.komnasperempuan.or.id>2015/02)

Argumentasi mendasar perlunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan

rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus oleh Negara. Adapun Undang-undang yang mengatur tentang Kekerasan Seksual yaitu UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 8(b)

Berdasarkan pengamatan peneliti dari data yang diperoleh terdapat beberapa masalah dalam penanganan kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan yang cukup pesat yaitu pada tahun 2014-2015 sebagaimana data yang telah dijelaskan diawal bahwa pada tahun 2014 hanya terjadi 4 kasus sedangkan pada tahun 2015 telah mengalami peningkatan yaitu berjumlah 13 kasus.

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya dengan judul penelitian **“Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Studi Kasus: Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai)”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Sinjai?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dilihat dari segi efisiensi dan efektivitas pada kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi/ pihak- pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Studi Kasus: Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai)

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* di berbagai bidang pembangunan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kinerja

II.1.1 Pengertian Kinerja

Terminologi kinerja merupakan suatu istilah dalam manajemen yang didefinisikan melalui perspektif atau sudut pandang yang berbeda oleh para ahli. Konseptualisasi tersebut sangat bergantung dari implementasi di Institusi apa pengertian tersebut ditempatkan. Kinerja yang diterjemahkan dari kosa-kata bahas Inggris *performance*, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, unjuk kerja, atau penampilan kerja (LAN, 1992). Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1997), dikatakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan tersebut mengandung makna bahwa kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Achmad Amins, 2012:40)

Hal yang sama dikatakan Rivai dan Basri (2005) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu disepakati bersama. Kinerja juga merupakan alat ukur manajemen yang digunakan untuk menilai tingkat pertanggungjawaban seseorang dalam melakukan tugasnya (Wittaker, 1997).

Sedangkan Harsey dan Blanchard (1988) menyatakan kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Sementara Robbins sebagaimana dikutip Rivai dan Basri mengemukakan tentang dimensi kinerja sebagai fungsi interaksi kemampuan atau *ability* (A), motivasi atau *motivation* (M) dan kesempatan atau *opportunity* (O) dan secara matematis dinyatakan $Kinerja = f(A \times M \times O)$, yang artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan.

Kinerja berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, namun juga dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Hal ini sesuai dengan model *partner-lawyer* sebagaimana dikemukakan Donnelly, Gibson dan Ivancevich (1995) bahwa kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor : (a) harapan mengenai imbalan, (b) dorongan, (c) kemampuan, (d) kebutuhan dan sifat, (d) persepsi terhadap tugas, (e) imbalan internal dan eksternal, (f) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentukan tiga hal, yaitu (1) kemampuan, (2) keinginan, dan (3) lingkungan. Hal itu berarti, kinerja sangat erat hubungannya dengan perilaku individu (*individual behavior*). Dengan demikian agar diperoleh kinerja yang baik, maka seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya.

Konsepsi lain berpendapat bahwa kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melakukansuatu pekerjaan. Dikaitkan dengan peran individu dalam

organisasi, bahwa kinerja adalah serangkaian perilaku atau kegiatan individu yang sesuai dengan harapan atau keinginan organisasi tempat ia bekerja (Arnold & Feldman, 1986). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005). Sedangkan Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi, yaitu antara lain: 1) kuantitas *output*, 2) kualitas *output*, 3) jangka waktu *output*, 4) kehadiran di tempat kerja. Steers dan Porter (1987) menyebutkan dalam kinerja (performansi) dipengaruhi oleh motif- motif individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan, Sulistiyani dan Rosidah (2003) menyatakan kinerja seorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.

Lebih lanjut, Robbins (2000) dalam (Achmad Amins. 2012: 46) menyatakan bahwa pencapaian yang telah ditetapkan merupakan suatu tolak ukur kinerja individu. Ada tiga kriteria dalam melakukan penilaian kinerja individu, yakni: (a) hasil kerja individu (*individual task outcomes*), perilaku (*behaviors*), dan ciri (*traits*). Hasil kerja individu tergantung pada perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Untuk mengukur hasil kerja individu berupa data atau informasi, jasa dan benda. Evaluasi pengukurannya berupa kuantitas dan kualitas yang dihasilkan. Kualitas dilihat dari ketepatan, keterampilan, ketelitian dan kerapian hasil kerja. Kuantitas dilihat dari jumlah dari keluaran atau seberapa cepat seseorang dapat menyelesaikan tugas- tugas ekstra atau mendesak. Adapun pengertian perilaku disini adalah perilaku yang sering dilakukan dan berkaitan

dengan tugas yang harus ia lakukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mengukur kinerja berdasarkan perilaku kerja dapat dilakukan dengan mengevaluasi aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dalam kaitannya dengan pekerjaannya atau bagaimana karyawan mengerjakan pekerjaannya. Pengukuran berdasarkan perilaku akan menghasilkan objektivitas, yaitu keluaran yang mampu dihasilkan karyawan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Sedangkan ciri individu merupakan sifat bawaan seseorang yang mencakup antara lain; percaya diri, dapat diandalkan, dapat bekerja sama, dan berpengalaman. Untuk pengukuran kinerja berdasarkan ciri individu dapat dilakukan dengan mengukur prestasi kerja berdasarkan fungsi karyawan. Namun demikian, pengukuran kinerja lebih baik ditekankan pada kriteria perilaku daripada kriteria karakteristik.

Pemaknaan kinerja mengarah pada tiga fokus, yaitu 1) *individual centered*, pemaknaan kinerja yang mengarah pada kualitas personal pegawai, 2) *job centered* adalah pemaknaan kinerja yang mengarah pada unjuk kerja dalam bidang atau tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai, dan 3) *objective centered*, pemaknaan kinerja yang mengarah pada hasil kerja atau prestasi kerja.

Bila berbicara mengenai kinerja sangat perlu dikaitkan dengan apa yang disebut *Standard Performance*, seperti yang dikemukakan Strauss dan Sayles (1980: 47) bahwa: "*Managers expected to be held to standard of accountability, and most managers prefer to have there established unambiguously so they know where to direct their engages. In effect, the standard estabilished aa target, and at the end of the target period (week, month, or year) both manager and boss can compare the expected standard of performance with the actual level of*

achievement". Dari pernyataan tersebut jelas bahwa standar kerja perlu dirumuskan untuk dijadikan acuan dalam mengadakan perbandingan terhadap apa yang dicapai dengan apa yang diharapkan. Standar tersebut dapat dijadikan sebagai patokan dalam mengaakan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan.

Ketika membahas kinerja, perlu dikaji mengenai sumber- sumber yang menyebabkan kinerja yang tidak efektif. Menurut castetter (1981) dalam (Achmad Amins. 2012: 46) sumber utama yang menyebabkan kinerja tidak efektif berasal dari :

1. Sumber individu itu sendiri, antara lain :

- Kelemahan intelektual
- Kelemahan psikologis
- Kelemahan fisiologis
- Demotivasi
- Factor personalitas
- Keusangan atau ketuaan
- Preparasi posisi, dan
- Disorientasi nilai

2. Sumber dari organisasi, yaitu :

- System organisasi
- Peranan organisasi
- Kelompok- kelompok dalam organisasi
- Perilaku yang berhubungan dengan pengawasan
- Budaya organisasi

3. Sumber dari lingkungan eksternal, yaitu :

- Keluarga
- Kondisi ekonomi
- Kondisi politik
- Kondisi hukum
- Nilai- nilai sosial
- Pasar kerja
- Perubahan teknologi, dan
- Pekumpulan- perkumpulan

Faktor yang menjadi penyebab kinerja tidak optimal perlu diperhatikan agar dapat dengan mudah diketahui sehingga dapat dicari solusi untuk meningkatkan kinerja personal dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, dalam panduan penyelenggaraan evaluasi diri di perguruan tinggi dinyatakan bahwa untuk menilai kinerja personal indikator kinerja, yaitu pernyataan yang bersifat kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan kualitas atau mutu pencapaian tujuan.

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas Amstrong dan Barong mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Amstrong dan Baron, 1998 :15). Lebih jauh Indra Bastian mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi

dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Secara terpisah Harmani Pasolong mengatakan "... bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen yaitu :

- a. Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok
- b. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
- c. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- d. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

II.1.2. Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah pendidikan, pelatihan, motivasi, kompensasi, lingkungan kerja dan kepemimpinan. Untuk lebih jelasnya keenam faktor tersebut diatas dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap para tenaga kerja sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerja mereka. Pendidikan berhubungan dengan menambah pengetahuan umum dan pengertian tentang seluruh lingkungan kerja. Pendidikan berhubungan dengan menjawab *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa), dan biasanya pendidikan lebih banyak berhubungan dengan teori tentang pekerjaan. Sekaligus bahwa pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari seorang tenaga kerja.

2. Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu proses aplikasi, terutama terhadap peningkatan kecakapan. Karena itu, perlu dipelajari bagaimana caranya melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi. Pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batas yang ditarik antara pelatihan dan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupannya serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang.

3. Motivasi

Menurut Veitzel Rivai (2004:455) mengemukakan bahwa motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Pada dasarnya motivasi dapat memacu pegawai untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja pegawai sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi

4. Kompensasi

Masalah kompensasi selain sensitive karena menjadi pendorong seseorang untuk bekerja, juga karena berpengaruh terhadap moral dan disiplin tenaga kerja. Oleh karena itu, setiap organisasi harus dapat memberikan kompensasi yang seimbang dengan beban kerja yang dipikul oleh tenaga kerja/pegawai. Dengan demikian, tujuan pembinaan tenaga kerja adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna dapat terwujud. Lebih dari itu, tujuan organisasi untuk meningkatkan keluaran produksi dapat ditunjang. Dari pengertian diatas, kompensasi merupakan bentuk penghargaan, member penghargaan atas hasil yang telah dicapai. Kebijakan organisasi dalam hal kompensasi member penguatan perilaku kerja yang telah memberikan kontribusi positif bagi organisasi.

5. Lingkungan kerja

Organisasi dapat berkembang merupakan keinginan setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Sehingga diharapkan dengan

perkembangan tersebut organisasi mampu bersaing dan mengikuti kemajuan zaman. Karena itu, tujuan yang diharapkan oleh organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat internal dan eksternal. Sejauh mana tujuan organisasi tersebut telah tercapai dapat dilihat dari beberapa besar organisasi memenuhi tuntutan lingkungannya. Memenuhi tuntutan lingkungan berarti dapat memanfaatkan kesempatan atau mengatasi tantangan lingkungan atau ancaman dari lingkungan dalam rangka menghadapi atau memenuhi tuntutan dan perubahan-perubahan dilingkungan organisasi.

6. Kepemimpinan

Kepemimpinan suatu organisasi termasuk didalamnya mengelola sumber daya manusianya, sehingga diperlukan sekali prinsip-prinsip atau teori-teori manajemen, termasuk prinsip dan teori kepemimpinan. Setiap kemampuan dalam kepemimpinan harus melekat erat pada seorang manajer, apapun ruang lingkup tanggung jawabnya. Karena tanpa kemampuan memimpin, lebih-lebih dalam hal manajemen sumber daya manusia, tidak mungkin seorang manajer berhasil baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sikap dan gaya serta perilaku kepemimpinan manajer sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi yang dipimpinnya, bahkan dapat berpengaruh terhadap produktifitas organisasinya.

Hariandja mengemukakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang ataupun kelompok orang dalam suatu organisasi baik formal maupun informal, public maupun swasta yang

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut lebih difokuskan pada individu yang terlibat dalam organisasi dalam usaha pencapaian kinerja. Faktor-faktor yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kuantitas Pekerjaan (*Quantity of Work*)

Yaitu banyaknya beban pekerjaan atau jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai. Diukur dari kemampuan secara kuantitatif didalam mencapai target atau hasil kerja sesuai dengan apa yang dibebankan.

2. Kualitas Pekerjaan (*Quality of work*)

Merupakan tingkat sejauh mana pekerjaan itu baik atau buruk buat pegawai. Ini dapat dilihat dari segi ketelitian, kerapian kerja, kecepatan untuk menyelesaikan pekerjaan, keterampilan kecekatan pegawai dalam bekerja.

3. Pengetahuan kerja (*Job Knowledge*)

Merupakan proses penempatan seorang pegawai yang disesuaikan dengan background pendidikan atau keahliannya dalam suatu pekerjaan. Hal ini dapat ditinjau dari kemampuan pegawai dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan.

4. Kerjasama Tim (*Team Work*)

melihat bagaimana seorang pegawai bekerja dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kerja sama tidak hanya sebatas secara vertical atau kerja sama antar pegawai, akan tetapi kerjasama secara horizontal pun merupakan factor yang sangat penting dalam kehidupan berorganisasi yaitu dimana pimpinan organisasi dan para pegawainya

terjalin suatu hubungan yang kondusif dan menghasilkan suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

5. Kreatifitas (*Creatifity*)

Kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan cara- craa atau inisiatif sendiri dianggap efektif dan efisien serta mampu mencitaan perubahan- perubahan guna untuk melakukan perbaikan demi kemajuan organisasi.

II.1.3 Pengukuran Kinerja

Dalam pemahaman tentang konsep pengukuran kinerja, Lembaga Administrasi Negara/ LAN (2001: 5) menyebutkan pendapat para pakar diantaranya pendapat James B. Whittaker (1993) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goal and objectivites*).

Menurut B. Whittaer dalam buku (Ismail Nawawi) yaitu elemen kunc dari system pengukuran kinerja yaitu :

- Perencanaan dan penetapan tujuan
- Pengembangan ukuran yang relevan
- Pelaporan formal atas hasil
- Penggunaan informasi

Indikator kinerja atau *performance indicators* kadang- kadang dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja (*performance measures*, tetapi banyak

pula yang membedakannya. Pengukuran kinerja berkaitan dengan hasil yang dapat dikuantitatifkan dan mengolah data setelah kejadian.

Sementara itu indikator kinerja dipakai aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Indikator kinerja juga menganjurkan sudut pandang prospektif (harapan ke depan) daripada retrospektif (melihat ke belakang). Hal ini menunjukkan jalan pada aspek kinerja yang perlu diobservasi.

Terdapat tujuh indikator kinerja. Dua di antaranya mempunyai peran sangat penting, yaitu *tujuan* dan *motif*. Kinerja ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Dengan demikian, tujuan dan motif menjadi indikator utama dari kinerja.

Namun kinerja memerlukan adanya dukungan *sarana, kompetensi, peluang, standar, dan umpan balik*. Kaitan diantara ketujuh indikator tersebut digambarkan oleh Hersey, Blanchard, dan Johnson (Wibowo:102) dengan penjelasan seperti berikut ;

1. Tujuan

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mengandung makna tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan.

Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan menunjukkan arah ke mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan kinerja individu, kelompok dan

organisasi. Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Standar

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai.

Standar menjawab pertanyaan tentang kapan kita tahu bahwa kita sukses atau gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

3. Umpan Balik

Antara tujuan, standar, dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik terutama penting ketika kita mempertimbangkan *'real goals'* atau tujuan sebenarnya. Tujuan yang dapat diterima oleh pekerja adalah tujuan yang bermakna dan berharga.

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

4. Alat atau Sarana

Alat atau Sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas

pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak dapat mungkin melakukan pekerjaan.

5. Kompetensi

Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Orang harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu, orang harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

6. Motif

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintensif.

Menurut Sekim dan Woodward dalam Nasucha (2004: 108) mengemukakan bahwa ada lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik antara lain :

- a. Pelayanan yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah daripada yang direncanakan.
- b. Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah daripada yang direncanakan

- c. Efisiensi, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran
- d. Efektivitas, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dan kebijakan yang dihasilkan

Sedangkan Dessler (1997) dalam (Edy Sutrisno, 2011: 181), menyatakan beberapa hal yang digunakan untuk menilai kinerja disebutkan antara lain :

1. Keterampilan merencanakan

- Menilai dan menetapkan prioritas dari bidang hasil
- Merancang rencana jangka panjang dan pendek yang realistis
- Merumuskan jadwal yang mungkin
- Mengantisipasi masalah- masalah yang mungkin dan hambatan- hambatan ke arah pencapaian hasil yang dituntut

2. Keterampilan mengorganisasi

- Mengelompokkan kegiatan demi penggunaan optimal atas sumber- sumber personel dalam rangka mencapai tujuan
- Secara jelas mendefinisikan tanggung jawab dan batas wewenang bawahan
- Meminimalkan kebingungan dan ketidakefisienan dalam operasi kerja

3. Keterampilan mengarahkan

- Kemampuan untuk memandu dan menyelia
- Menekankan proses motivasi, komunikasi dan kepemimpinan

4. Keterampilan mengendalikan

- Menetapkan prosedur yang tepat untuk terinformasi tentang kemajuan kerja bawahan
- Mengidentifikasi simpangan dalam kemajuan tujuan kerja
- Menyesuaikan diri dalam kerja untuk dapat memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan telah dicapai

5. Menganalisis masalah

- Menetapkan dana yang berhubungan dengan permasalahan
- Membedakan fakta- fakta yang berarti dari yang kurang berarti
- Menetapan hubungan timbal balik
- Mencapai pemecahan yang kelihatannya praktis

Menurut Schuler dan Dowling (Kramar, McGraw & Schuler, 1997: 371) kinerja dapat diukur dari (1) kuantitas kerja, (2) kualitas kerja, (3) kerjasama, ketepatan waktu, (4) pengetahuan tentang kerja, (5) kemandirian kerja, (6) kehadiran dan ketepatan waktu, (7) pengetahuan tentang kebijakan dan tujuan organisasi, (8) inisiatif dan penyampaian ide- ide yang sehat, (9) kemampuan supervise dan teknis (Keban, 2006: 214)

II.1.4 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja McDonald dan Lawton (dalam Ratminto dan Winarsih, 2005: 174) mengemukakan indikator kinerja antara lain : *output oriented measures throughput, efficiency, effectiveness*. Selanjutnya indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. *Effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.

II.2 Konsep Organisasi

II.2.1 Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan elemen yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Organisasi membantu dalam melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu dan organisasi pula dapat memenuhi aneka macam kebutuhan manusia seperti misalnya kebutuhan emosional, spiritual, intelektual, ekonomi, politik, psikologikal, sosiologikal, cultural dan sebagainya.

Mills dan Mills (2000: 58) mendefinisikan organisasi sebagai :*“specific collectivities of people whose activities are coordinated and controlled in and for the achievement of defined goals”*. Organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang aktivitas- aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

E.Wight Bakke mendefinisikan organisasi *“A continuing system of differentiated and coordinated human activities utilizing, transforming, and welding together a specific set of human, material, capital, ideational, and natural resources into a unique problem- solving whole engaged in satisfying particular human needs in interaction with other system of human activities and resources in*

its environment". Dapat diartikan organisasi adalah suatu system berkelanjutan dari aktivitas- aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan- kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan system- system lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

II.2.2 Pengertian Kinerja Organisasi

Suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi privat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku (*actors*) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan

Chaizi Nasucha mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha- usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

II.2.3 Penilaian kinerja Organisasi

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai- nilai sebagaimana ditetapkan dalam visinya tercapai. Nilai- nilai ini merupakan nilai- nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholders dari organisasi yang bersangkutan. Karena itu pencapaian visi ini adalah indikator

yang paling penting. Akan tetapi sering kali visi organisasi dapat tercapai namun bukan secara sengaja atau sebagaimana direncanakan. Karena itu perlu juga dinilai pengembangan misi organisasi dan keterkaitannya dengan pencapaian visi.

Menurut Amitai Etzioni, efektivitas organisasi menggambarkan sampai seberapa jauh suatu organisasi merealisasikan tujuan akhirnya (goals), sedangkan secara lebih umum, sebagaimana dikatakan oleh John R. Kimberly, menyangkut suatu kondisi yang diperlukan organisasi untuk tetap bertahan hidup atau yang dikenal dengan istilah "survival" (Robbins, 1990:49) dengan jumlah 30 kriteria efektivitas.

Stephen P. Robbins (1990: 53- 77) dengan meminjam pendapat dari Kim S. Cameron, mengungkapkan bahwa dalam mengukur efektivitas organisasi terdapat empat pendekatan antara lain pendekatan "goal- attainment", pendekatan "system", pendekatan "strategic- constituencies", dan "competing-values"

Pendekatan "goal- attainment", mengukur sampai seberapa jauh tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pendekatan ini yang ditekankan adalah hasil dan cara. Persyaratan yang dibutuhkan dalam definisi ini adalah bahwa tujuan yang hendak dicapai benar- benar jelas, memiliki batas waktu pencapaian yang jelas dan dapat diukur. Pendekatan "system", mengukur tersedianya sumber daya yang dibutuhkan, memelihara dirinya secara internal sebagai suatu organisme, dan berinteraksi secara sukses dengan lingkungan luar. Disini dibutuhkan adanya suatu hubungan yang jelas antara input dengan output. Pendekatan "strategic- constituencies" mengukur tingkat kepuasan dari para konstituen kunci. Dukungan

konstituen kunci inilah yang dibutuhkan organisasi untuk mempertahankan eksistensi selanjutnya. Asumsi yang digunakan dalam pengukuran ini adalah bahwa para kosntituen memiliki pengaruh yang kuat terhadap organisasi, dan organisasi diharuskan merespon terhadap tuntutan para konstituen tersebut. Dan pendekatan “competing- values” mengukur apakah kriteria keberhasilan yang dipentingkan organisasi seperti keadilan, pelayanan, return on investment. Market share, new- product innovation, dan job security, telah sesuai dengan kepentingan atau kesukaan para konstituennya (Keban, 2006: 228)

II.2.4 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, peyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, reintegrasi social dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.

Tujuan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan dan anak

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan pelayanan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi perempuan dan anak, seperti KDRT, trafficking, eksploitasi, penelantaran, pendampingan hukum, psikologis, social bagi klien.
- b. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan
- c. Medorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan diberbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak (pusat data, konseling, pelatihan, rujukan, dll)
- d. Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerja sama/ kemitraan yang dapat mendukung P2TP2A

Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebaga berikut :

1. Membntu Gubernur mengkoordinasikan kegiatan P2TP2A dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak dengan menjunjung tinggi aspek- aspek Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan, Pemberdayaan, dan Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
3. Mendorong dan mengembangkan peran serta masyarakat terutama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, sebagai upaya peningkatan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut P2TP2A Kabupaten Sinjai dapat bekerja sama dengan Instansi Pemerintah, Organisasi masyarakat, dan pihak- pihak yang dianggap perlu

Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian antara unsur pemerintah dan unsur masyarakat
- b. Pengkoordinasian antara P2TP2A Kabupaten dengan P2TP2A Kota dan Provinsi.

Fungsi Pengkajian dan Penelitian meliputi kegiatan :

1. Pengkajian berbagai instrument Peraturan Per-undang- undangan yang menyangkut Perlindungan Perempuan dan Anak dan HAM.
2. Penelitian segala peristiwa dan permasalahan yang menyangkut dan menimpa Perempuan dan Anak
3. Studi kepustakaan, studi lapangan serta studi banding mengenai program peningkatan kesejahteraan Perempuan dan Anak
4. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian

Fungsi Advokasi :

- a. Pendampingan terhadap korban yang menghadapi persoalan hukum
- b. Pendampingan terhadap korban yang menghadapi tekanan, perlakuan, tindak kekerasan maupun pelanggaran HAM
- c. Pendampingan proses dan pelaksanaan jaminan sosial korban
- d. Memfasilitasi rujukan bagi korban yang memerlukan pelayanan, perawatan dan perlindungan khusus

Fungsi Pencegahan :

- a. Sosialisasi melalui Jalur Pendidikan Formal & non Informal
- b. Sosialisasi melalui jalur Pengaduan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, LSM dan Kelompok masyarakat lainnya
- c. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik
- d. Pengkaderan pembentukan kelompok simpatik di sekolah (SD, SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi dan Sederajat.

Fungsi Penindakan :

- a. Tindak cepat pertolongan dan penanganan kasus
- b. Mempercepat prosedur perawatan dan perlindungan korban
- c. Memberikan situasi kenyamanan korban selama masa perlindungan tindak awal

Fungsi Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial :

- a. Membentuk institusi yang berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka pemulihan/ rehabilitasi sosial korban
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi sosial korban kekerasan perempuan dan anak
- c. Melakukan sosialisasi terhadap korban yang terencana dan terpadu

Fungsi Rujukan :

- a. Melakukan tindak lanjut penanganan kasus dengan memberikan akses (rujukan) kepada institusi lain yang menangani kasus korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan tahapan pelayanan

- b. Melakukan kerja sama dengan berbagai institusi pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

II. 3 Pengertian Kekerasan Seksual

Berdasarkan Kamus Hukum,” sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin” (Yan Pramadya Puspa, 1989: 770). Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki- laki dan perempuan.

Marzuki Umar Sa’bah mengingatkan,” membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat” (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011: 32).

Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang immoral dan jahat. Artinya ada praktek seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma- norma keagamaan.

Oleh karena itu, Umar Sa’bah itu menunjukkan,” secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), 2) social (hubungan- hubungan seksual, berbagai aturan social

serta berbagai bentuk social melalui mana seks biologis diwujudkan) dan 3) subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara- cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha- usaha jahatnya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011: 32)

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan dari korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pelaku dengan korban terdapat hubungan sugnifikan. Artinya, hugungan antara korban dengan pelaku lebih banyak sebagai bangunan hubungan yang cukup dekat. Kedekatan hubungan dapat menjadi fakor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan. Disaat interaksi pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku

Menurut Komnas Perempuan jenis kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang ditemukan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998–2013), yaitu:

1. Perkosaan adalah sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam system hukum Indonesia dan dilakukan terhadap anak dibawah usia 18 tahun.
2. Percobaan Perkosaan adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan langsung atau melalui pesan singkat. Ancaman atau percobaan perkosaan termasuk kategori ini.
3. Pelecehan Seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual korban. Seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan menunjukkan materi pornografi ke dalam kategori ini
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Dari sejumlah pendapat pakar, bahwa faktor penyebab kekerasan seksual setidak- tidaknya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki- laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bias lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki- laki dengan perempuan
3. Rendahnya pengamalan dan pengamatan terhadap norma- norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai- nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat control masyarakat (*social control*), yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur- unsur masyarakat
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota- anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat.

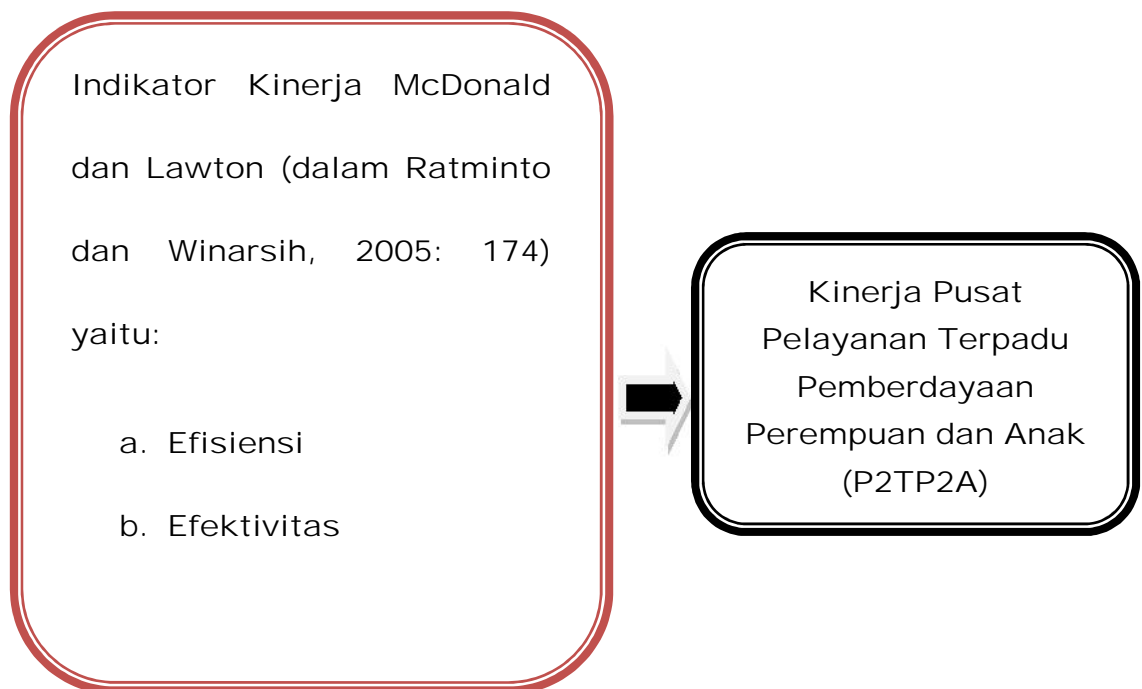
Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya

6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya dicarikan kompensasi pemuasnya
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan), dan perilaku korban yang menyakiti dan merugikannya.

II. 4 Kerangka Pikir

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh McDonald dan Lawton (dalam Ratminto dan Winarsih, 2005: 174) mengemukakan bahwa ada dua indikator dalam menilai kinerja yaitu dari segi *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran pada kasus kekerasan seksual dan dari segi *Effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi pada kasus kekerasan seksual

Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan menganalisis Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai

III.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu **di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sinjai.**

III.3 Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dasar penelitiannya adalah wawancara kepada narasumber/ informan yang berisi pertanyaan- pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.

III.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. yaitu pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di

Kabupaten Sinjai dimana berfokus pada prestasi kerja atau Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai

III.5 Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sinjai

Informan dalam penelitian yang berhubungan dengan Kinerja Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Sinjai adalah :

1. Ketua Umum P2TP2A
2. Sekertaris P2TP2A
3. Kepala Bidang P2TP2A
4. Konselor P2TP2A
5. Polres Kabupaten Sinjai
6. Korban yang tidak melapor

III.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara yakni kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data untuk kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya.

2. Dokumentasi

Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

III.7 Teknik Analisis Data.

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian, maka data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, telah disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai masalah peneliti.

III.8 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir

Kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi atau kegiatan tertentu selama kurung waktu tertentu, Sedangkan Kinerja organisasi

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2001:329)

Indikator Kinerja McDonald dan Lawton (dalam Ratminto dan Winarsih, 2005: 174) mengemukakan indikator kinerja antara lain :

- a. Efisiensi yang peneliti maksud adalah segala bentuk pelayanan ataupun pengaduan oleh P2TP2A Kabupaten Sinjai dalam melayani masyarakat dilihat dari perbandingan antara kasus yang telah dilaporkan dan kasus yang telah terselesaikan pada kasus kekerasan seksual
- b. Efektivitas yang peneliti maksud adalah tercapainya tujuan dari P2TP2A Kabupaten Sinjai, baik dalam bentuk target, program dan peran pada kasus kekerasan seksual

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah Kabupaten Sinjai dan gambaran umum objek penelitian yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sinjai. Gambaran umum Kabupaten Sinjai mencakup kondisi fisik dan wilayah, kependudukan dan gambaran umum Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sinjai terdiri dari visi dan misi organisasi; kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi.

IV.1. Gambaran Umum Lokasi

IV.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sinjai

IV.1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sinjai merupakan Kabupaten pesisir yang terletak di pesisir timur bagian selatan daratan Sulawesi Selatan yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Bone. Batas- batas wilayah Kabupaten Sinjai

Adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Kabupaten Sinjai yang memiliki luas 81996 Ha terdiri dari 9 Kecamatan defenitif dengan jumlah Desa sebanyak 67 dan 13 kelurahan. Wilayah

Kabupaten Sinjai terbagi dua yakni berada di daratan Sulawesi Selatan dan Pulau- Pulau yang dikenal dengan Pulau-Pulau Sembilan. Pada wilayah daratan memiliki panjang garis pantai sekitar 23 km, dan terdapat lima sungai besar yang bermuara di sepanjang pantai yakni Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Panaikang, Sungai Bua dan Sungai Pattongko. Selain itu, juga terdapat dua sungai kecil yakni Sungai Donga dan Sungai Balampangi. Keberadaan sungai-sungai tersebut juga merupakan batas wilayah administrasi baik desa, kecamatan, maupun antar Kabupaten. Sungai Tangka menandai antara Kecamatan Sinjai Timur dengan Kecamatan Tellu Limpoe, dan Sungai Pattongko (Sungai Lolisang) menandai batas Kabupaten Sinjai dengan Kabupaten Bulukumba. Pada wilayah pulau terdiri atas sembilan pulau kecil dan beberapa gosong karang. Dari sembilan pulau hanya satu pulau yang tidak berpenghuni, yaitu Pulau Larearea. Pulau yang berpenghuni bila diurutkan dari utara adalah Kanalo 2, Kanalo 1, Batang Lampe, Kodingare, Katindoang, Kambuno, Liangliang dan Burung Loe.

IV.1.1.2 Kependudukan

Jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk dalam wilayah perencanaan merupakan sebuah indikator yang penting untuk diketahui. Penduduk Kabupaten Sinjai hingga tahun 2015 berjumlah 138.809 Jiwa yang tersebar tidak secara merata dalam 9 kecamatan. Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Selatan merupakan kecamatan yang jumlah penduduknya paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Pulau Sembilan

IV.1.2 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sinjai

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai Lembaga Layanan Terpadu yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai kepengurusan struktur organisasi dengan mekanisme kerja berjejaring dengan sektor-sektor terkait antara lain:

- 1) Kepolisian
- 2) Kejaksaan
- 3) Pengadilan Negeri
- 4) Dinas Kesehatan
- 5) RSUD
- 6) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- 7) Dinas Pendidikan
- 8) Kementrian Agama, dan
- 9) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.

IV.1.2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Motto P2TP2A Kabupaten Sinjai

a). Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawah agar dapat eksis, antisipatif dan partisipatif. Visi adalah suatu

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi.

Dengan mengacu dan berpedoman kepada Visi Kabupaten Pinrang sebagai berikut: **“Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sinjai”**

b). Misi

Misi P2TP2A Kabupaten Sinjai yaitu sebagai berikut:

- Memberikan layanan yang terpadu secara medis, psikososial dan hukum dengan menyederhanakan prosedur bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk pemenuhan hak korban
- Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kemudahan untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Memberikan informasi dan edukasi akan hak-hak perempuan dan anak pada masyarakat

c). Tujuan P2TP2A Kabupaten Sinjai

1. Terpenuhinya layanan hukum sampai dengan diperolehnya kepastian hukum bagi pemenuhan hak korban
2. Terpenuhinya layanan psikososial untuk pemulihan dan kemandirian korban sehingga siap kembali ke lingkungan sosialnya
3. Terpenuhinya layanan medis dalam pemulihan fisik
4. Terpenuhinya mekanisme bersama untuk layanan korban

5. Terciptanya kondisi masyarakat yang sadar dan berdaya untuk melaporkan kasus kekerasan dan tersedianya layanan bagi korban yang mudah dijangkau
6. Terwujudnya kondisi masyarakat yang menghormati nilai- nilai anti kekerasan perempuan dan anak

IV. 1.2.2 Tugas dan Fungsi P2TP2A Kabupaten Sinjai

a). Tugas P2TP2A Kabupaten Sinjai

Dalam memberikan perlindungan dan penanganan korban kekerasan, P2TP2A Kabupaten Sinjai melakukan hal- hal berikut :

- Memberikan layanan secepat mungkin dan “tanpa biaya” kepada korban
- Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum
- Melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan pendamping yang diperlukan bagi korban
- Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah masyarakat atau lembaga- lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban
- Memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban
- Menjaga kerahasiaan korban

- Memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban
- Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, P2TP2A tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban

b). Peran dan Fungsi P2TP2A Kabupaten Sinjai

Dalam penyelenggaraan layanan terpadu maka P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. Penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan
- b. Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- c. Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- e. Pemulanan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- f. Memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

c). Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan akan berupaya bersungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sinjai secara responsif dan maksimal.

IV.1.2.3 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penanganan Pengaduan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sinjai

a). Ruang Lingkup Pelayanan P2TP2A Kabupaten Sinjai

Ruang lingkup Pelayanan P2TP2A Kabupaten Sinjai meliputi penanganan korban kekerasan yang melibatkan lintas Kabupaten/Kota dan lintas provinsi yang membutuhkan fasilitasi P2TP2A Kabupaten Sinjai.

Apabila terjadi kasus yang melibatkan lintas negara. Dikoordinasikan melalui Pemerintah Pusat maupun lembaga non pemerintah terkait.

b). Kriteria Petugas dalam melakukan pelayanan pada P2TP2A Kabupaten Sinjai

Petugas yang menangani pengaduan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan tentang gender dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
2. Memiliki pengetahuan tentang penerimaan/manajemen kasus
3. Memiliki pengetahuan tentang cara-cara penanganan pengaduan baik yang langsung maupun melalui telepon.

c). Devisi dalam struktur P2TP2A

1. Devisi pengaduan dan pendampingan bertugas dan menerima pengaduan, melakukan registrasi data korban, melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan, dan memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada

korban dan atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan.

2. Divisi kesehatan dan konseling bertugas menyelenggarakan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pelayanan lainnya.
3. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi bertugas memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan; memfasilitasi pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan, memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban; memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal; dan memfasilitasi reintegrasi sosial.
4. Divisi Bantuan dan Pendamping Hukum bertugas memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan; melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian Pengadilan; dan memfasilitasi perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak
5. Divisi Kerjasama dan Pengembangan bertugas melakukan kerjasama antar Institusi Pemerintah, SKPD, Lembaga Non-Pemerintah, Swasta dan Masyarakat; dan mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan.

d). Keanggotaan dalam divisi P2TP2A Kabupaten Sinjai

1. Divisi Pengaduan dan Pendampingan

Koordinator:

Kepala Sub Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai

Anggota:

- a. Ketua Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Kabupaten Sinjai
- b. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sinjai

2. Divisi Kesehatan dan Konseling

Koordinator:

Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Anggota:

- a. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sinjai
- b. Kepala Unit PPA Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai
- c. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai
- d. Kepala Bagian Bina Mental, Seni dan Budaya, Biro Bina Mental Spiritual Setda Kabupaten Sinjai
- e. Ketua Himpunan Psikolog (HIMPSI) Kabupaten Sinjai

3. Devisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

Koordinator:

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sinjai

Anggota:

- a. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sinjai
- b. Kepala Sub Bagian Reintegrasi Sosial Biro Kesra Setda Kabupaten Sinjai
- c. Kepala Bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai
- d. Brigade Siaga Bencana Kabupaten Sinjai

4. Devisi Bantuan dan Pendamping Hukum

Koordinator:

Kepala Unit PPA POLRES Kabupaten Sinjai

Anggota:

- a. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Kabupaten Sinjai
- b. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Sinjai
- c. Kepala BAPAS Kabupaten Sinjai
- d. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya Pada Asisten Tindak Pidana
- e. Kepala Bidang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi Kabupaten Sinjai
- f. Kasubag Sengketa Hukum Biro Hukum dan Ham Setda Kabupaten Sinjai

5. Devisi Kerjasama dan Pengembangan

Koordinator:

Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten
Sinjai

Anggota:

- a. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Sinjai
- b. Kabag Kelembagaan Biro Organisasi dan Kepegawaian, Setda
Kabupaten Sinjai
- c. Kasubag Pemberdayaan Penyandang Sosial, Biro Kesra Setda
Kabupaten Sinjai
- d. Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan,
Setda Kabupaten Sinjai
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan
Sosial Budaya, Masyarakat BPMPDK Kabupaten Sinjai
- f. Kepala Bagian Kerjasama Sosial Budaya, Biro Kerjasama Setda
Kabupaten Sinjai
- g. Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan, Bapedda
Kabupaten Sinjai
- h. Kepala Bidang Fasilitasi Hubungan Ormas dan LSM, Badan
Kesbang dan Linmas Kabupaten Sinjai

e). Langkah-langkah Pelayanan Penanganan Pengaduan pada P2TP2A Kabupaten Sinjai

Penanganan pengaduan dilakukan dengan cara:

1. Pelapor melapor secara langsung. Pelapor (korban atau keluarga, masyarakat dan/atau lembaga) datang secara langsung, melalui telepon dan/atau surat melaporkan dugaan tindak kekerasan
2. Pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga pemerhati, masyarakat, ataupun media massa
3. Pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas

f). Proses pelayanan pada P2TP2A Kabupaten Sinjai

1. Pelapor melapor secara langsung

- a. Korban diterima oleh petugas P2TP2A Kabupaten Sinjai yang ditugaskan khusus untuk melakukan identifikasi cepat tentang apakah pengadu adalah korban kekerasan
- b. Bila saat itu korban dalam keadaan tertekan, luka parah, pingsan, dan sebagainya, maka identifikasi cepat dapat juga dilakukan berdasarkan keterangan keluarga/pendamping lainnya
- c. Apabila korban berada dalam kondisi gawat, maka segera lakukan intervensi krisis sesuai dengan langkah-langkah penanganan korban krisis.
- d. Apabila identifikasi cepat menunjukkan bahwa pengadu adalah korban kekerasan dan dalam kondisi memungkinkan untuk diwawancarai, maka petugas menawarkan kepada korban untuk menjalani proses wawancara

- e. Diskusikan dengan korban atau pendamping tentang pilihan layanan yang dibutuhkan korban yaitu pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum atau pemulangan dan reintegrasi
- f. Pilihan yang diambil korban akan menjadi dasar pemberian pelayanan selanjutnya
- g. Dalam kasus anak yang tidak mempunyai pendamping atau wali, petugas bersama satu atau dua petugas yang profesional mempunyai wewenang khusus dengan memegang prinsip untuk kepentingan terbaik bagi anak.

2. Penanganan pengaduan melalui telepon pada P2TP2A Kabupaten Sinjai

Penerimaan pengaduan bagi korban kekerasan bisa diakses melalui telepon (0482) 23608 untuk pengaduan kekerasan terhadap perempuan, dan telepon Sahabat Anak (TeSA) Nomor untuk kekerasan terhadap anak. Pengaduan melalui telepon diperlukan bagi korban yang tidak mampu mengakses layanan dengan datang langsung. Pengaduan melalui telepon juga diperlukan korban yang merasa belum siap bertemu langsung dengan petugas penerima pengaduan.

Langkah-langkah Penanganan Pengaduan Telepon:

- 1) Siapkan buku pencatat kasus dan formulir penerimaan kasus melalui telepon dan buku daftar rujukan lengkap

- 2) Apabila korban hanya meminta informasi, jangan cepat puas dengan sekedar permintaan informasi, doronglah agar korban lebih berani mengemukakan masalahnya;
- 3) Sampaikanlah informasi tentang layanan yang tersedia pada P2TP2A Kabupaten Sinjai yang berkaitan dengan masalah yang diungkapkan pengadu;
- 4) Akhiri pembicaraan dengan rumusan tindak lanjut dengan kesediaan untuk mendampingi dalam menggali dan mengambil solusi
- 5) Bila memungkinkan, korban diminta untuk datang secara langsung agar dapat memperoleh pelayanan yang lebih maksimal

3. Penerimaan pengaduan melalui surat pada P2TP2A Kabupaten Sinjai

Penerimaan pengaduan melalui surat memberikan kesempatan pada korban/pelapor yang rumahnya jauh dari tempat layanan ataupun jauh dari prasarana telepon untuk dapat mengakses layanan pengaduan. Layanan penerimaan pengaduan melalui surat juga memberikan kesempatan kepada korban yang belum siap untuk membuka identitasnya secara penuh untuk melakukan peninjauan penyelesaian kasusnya.

Langkah-langkah penerimaan pengaduan melalui surat

- a. Petugas membaca surat yang masuk, kemudian surat disampaikan kepada petugas yang terkait dengan substansi masalah untuk dianalisa dan segera ditanggapi

- b. Apabila terdapat indikasi di dalam surat bahwa korban dalam keadaan bahaya seperti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), atau hubungan sedarah (incest), maka segera dikoordinasikan dengan kepolisian.
- c. Apabila tersedia pelayanan pengaduan (kepolisian, rumah sakit, atau lembaga pemerhati perempuan dan anak yang tergabung dalam P2TP2A) yang lokasinya lebih dekat dengan rumah korban, maka petugas harus menginformasikan nama dan alamat lembaga layanan yang terdekat dengan rumah korban.
- d. Surat dibuat rangkap dua, satu copy untuk dikirimkan kepada korban, dan satu copy disimpan sebagai arsip.
- e. Surat dikirimkan dalam amplop tertutup berperekat tanpa memakai namainstansi/lembaga.
- f. Copy surat diarsipkan dalam folder khusus

4. Penanganan pengaduan dari rujukan pada P2TP2A Kabupaten Sinjai

Apabila korban datang karena dirujuk oleh lembaga-lembaga lain, maka korban diterima sebagaimana korban yang datang secara langsung.

Sebelum mewawancarai korban, petugas harus memeriksa terlebih dahulu surat ataupun data-data yang dikirimkan oleh lembaga/individu perujuk. Dalam hal tidak ada surat surat rujukan ataupun data-data penyerta, maka langkah-langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung.

5. Penjangkauan korban (outreach) pada P2TP2A Kabupaten Sinjai

Apabila korban tidak bisa datang langsung, P2TP2A Kabupaten Sinjai akan mengirimkan petugas untuk melakukan penjangkauan (outreach) dan menawarkan pelayanan kepadanya.

Penjangkauan perlu dilakukan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan tapi tidak mampu datang langsung ke unit pelayanan (termasuk di rumah sakit)

Penjangkauan juga bisa menjadi tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, sms, atau surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitaan dimedia massa.

Dalam melakukan penjangkauan perlu memperhatikan aspek keamanan baik bagi korban, keluarga atau petugas unit pelayanan. Penjangkauan dilakukan dengan lebih terencana dan hati-hati untuk memastikan bahwa penjangkauan tidak akan menyebabkan korban dalam situasi yang lebih buruk. Dalam kasus kekerasan terhadap isteri misalnya, petugas harus memastikan bahwa ketika itu pelaku (suami korban) sedang tidak ada di rumah. Penjangkauan dapat pula tidak dilakukan di tempat tinggal korban bila korban merasa tidak aman melakukan pengaduan dan wawancara di rumah.

Langkah-langkah penjangkauan korban pada P2TP2A Kabupaten Sinjai:

- a. Sebelum melakukan penjangkauan maka petugas P2TP2A Kabupaten Sinjai berkoordinasi dengan petugas P2TP2A pada lokasi dimana korban berada
- b. Setelah berkoordinasi maka petugas mendatangi lokasi korban dan membawa korban ke P2TP2A terdekat lebih dahulu atau langsung P2TP2A Kabupaten Sinjai
- c. Jika korban dalam kondisi kurang aman maka petugas harus memastikan terlebih dahulu tentang keamanan korban dan dirinya sendiri dengan berkoordinasi dengan UPPA Polres/Polsek pada lokasi dimana korban berada
- d. Petugas melakukan pemetaan cepat tentang situasi di lokasi penjangkauan, dan menentukan strategi/jalan masuk yang paling aman untuk menjangkau korban
- e. Memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan penjangkauan dan manfaatnya untuk korban
- f. Memastikan bahwa korban setuju dengan tawaran penjangkauan
- g. Mendiskusikan tentang hal keamanan yang mesti diperhatikan
- h. Untuk korban anak, melakukan proses di atas dengan keluarga yang bertanggung jawab
- i. Pastikan adanya pendamping yang dipercayai oleh anak untuk turut serta ke P2TP2A
- j. Jika korban menolak untuk melakukan proses pendampingan lebih lanjut petugas mengajak korban untuk membuat perencanaan penyelamatan diri (*safety plan*) yang mencakup cara melarikan diri

dari rumah, cara mencapai tujuan penyelamatan, penyimpanan dokumen penting dan uang bekal.

- k. Sebelum meninggalkan tempat, petugas memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu korban berubah pikiran.
- l. Memulai wawancara dengan korban, bila korban telah menyatakan persetujuannya
- m. Langkah-langkah selanjutnya sama dengan penerimaan pengaduan bagi pelapor yang datang langsung
- n. Sebelum meninggalkan tempat, petugas memberikan nama, alamat dan nomor kontak dan meminta agar korban menyimpan di tempat yang aman.

6. Langkah-langkah intervensi krisis pada P2TP2A Kabupaten Sinjai

Apabila korban tidak dalam kondisi baik untuk terlibat dalam wawancara atau pembuatan kesepakatan, karena korban dalam kondisi ketakutan yang amat besar terhadap keamanan diri atau keluarganya, maka prosedur normal tidak akan bisa dijalankan

Untuk itu, langkah-langkah krisis perlu dilakukan yaitu:

- 1. Petugas menenangkan klien terlebih dahulu; apabila klien terlihat sangat tegang, terapkan relaksasi sederhana (jika diperlukan)
- 2. Petugas merujuk korban ke penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi korban (medis, psikologis atau keamanan) sesuai tingkat emergency yang terjadi hingga klien menjadi sepenuhnya siap untuk berbicara

3. Petugas membawa korban ke tempat yang lebih aman bila korban berada dalam keadaan bahaya dan meminta polisi bilamana diperlukan.

7. Rujukan pada P2TP2A Kabupaten Sinjai

Setelah petugas melakukan assessment terhadap masalah korban dalam formulir pelayanan penanganan pengaduan, maka dengan persetujuan korban petugas kemudian merujuk korban ke pelayanan yang sesuai berdasarkan surat pengantar rujukan (lihat lampiran dalam SOP ini), dan selanjutnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Petugas menyampaikan kepada lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan
2. Petugas menghubungi lembaga yang akan menerima rujukan
3. Jika korban adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan/perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan
4. Petugas melengkapi surat rujukan yang diperlukan dan dilengkapi dengan identitas korban serta kronologi kejadian (narasi kasus)
5. Petugas memastikan korban mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat;
6. Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan.

8. Pencatatan dan palaporan kasus

Selain untuk kepentingan penanganan kasus, data kasus yang lengkap sangat dipentingkan untuk kebutuhan analisis kasus dan advokasi. Pencatatan kasus ini setidaknya meliputi identitas korban (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), identitas pelaku (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), hubungan antara korban dan pelaku, tempat kejadian, waktu/tanggal kejadian, jenis kekerasan dan narasi kejadian, nomor registrasi, keterangan kasus/rujukan dan petugas pelayanan. Pencatatan kasus sedapat mungkin tidak dilakukan secara berulang yang dapat menyebabkan korban merasa tertekan. Karenanya bila ada rujukan, data korban juga harus disertakan. Pendataan boleh dilakukan lagi oleh lembaga yang dirujuk bila diperlukan data-data/informasi tambahan untuk kepentingan tertentu khususnya dalam upaya melakukan intervensi pencegahan terjadinya kasus yang sama.

IV. 1.2.4 Standar Pelayanan Publik (SPP) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

a. Pelayanan Pengaduan dan Rujukan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1. Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Pengaduan dan Rujukan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan :
 - 1) Korban yang datang melapor baik langsung maupun memakai rujukan mendatang P2TP2A dan diterima oleh petugas penerima pengaduan,

sedang klien yang mendapat penjangkauan akan didatangi oleh petugas

- 2) Petugas mendata klien
- 3) Petugas melakukan wawancara untuk mengetahui kasus yang dialami oleh korban
- 4) Petugas melakukan analisis akan kebutuhan korban
- 5) Setelah menyimpulkan kebutuhan korban, petugas, meminta persetujuan korban atau keluarga untuk dilakukan tindakan
- 6) Petugas merekomendasikan pelayanan lanjutan sesuai hasil analisis
- 7) Petugas membuat rujukan dengan persetujuan Ketua P2TP2A dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Sinjai

2. Persyaratan

- 1) Korban yang melapor secara langsung membawa KTP/KK, serta foto (dokumentasi) bila perlu
- 2) Korban yang mendapat rujukan dari lembaga terkait/ masyarakat membawa surat keterangan dari lembaga/ instansi atau perangkat desa/ kelurahan atau kecamatan
- 3) Korban yang mendapat layanan jangkauan langsung, memberikan alamat lengkap dapat melalui telpon ataupun laporan keluarga

3. Jangka Waktu Penyelesaian : 3 jam (bagi korban kekerasan yang harus segera mendapat pelayanan medis, penyelesaian dilaksanakan dengan melihat kondisi pelapor)

4. Biaya/Tarif : Tidak ada

5. Produk Pelayanan : Rujukan ke pusat pelayanan lanjutan

b. Pelayanan Pendampingan Perempuan dan Anak

1. Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- 1) Korban yang telah mendapat rujukan kemudian mendapat pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social dan/ atau bantuan hukum
- 2) Jika korban harus segera mendapatkan penanganan medis karena luka- lukanya maka korban masuk dalam proses rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis dan pelayanan kritis sesuai kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.
- 3) Jika korban diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak social yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan

2. Persyaratan : Korban telah mendapat rujukan hasil analisis kebutuhan sesuai kasus yang dihadapi oleh petugas P2TP2A

3. Jangka Waktu Penyelesaian : 3 jam (bagi korban kekerasan yang harus segera mendapat pelayanan medis, penyelesaian dilaksanakan dengan melihat kondisi pelapor)

4. Biaya/Tarif : Tidak ada

5. Produk Pelayanan : Rujukan ke pusat pelayanan lanjutan

IV.1.2.5 Susunan Organisasi P2TP2A Kabupaten Sinjai

Keanggotaan P2TP2A Kabupaten Sinjai terdiri dari unsur pemerintah meliputi perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai terkait, Polres Sinjai, Kejaksaan, Pengadilan, Jumlah pegawai untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Kepegawaian Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	1 orang
3	Sekretaris Umum	1 orang
4	Wakil Sekretaris	1 orang
5	Koordinator Harian	1 orang
6	Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum	3 orang
7	Divisi Pengaduan dan Pendampingan	3 orang
8	Divisi Kesehatan dan Konseling	3 orang
9	Divisi Bidang Kerjasama dan Pengembangan	3 orang
10	Divisi Rehabilitasi, Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi	3 orang
12	Konselor	2 orang
13	Tenaga Administrasi	2 orang

Sumber: P2TP2A Kabupaten Sinjai 2016

IV.2 Hasil dan Pembahasan

IV.2.1 Hasil Penelitian

Kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi atau kegiatan tertentu selama kurung waktu tertentu. Untuk kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), penulis menggunakan dua indikator yang dikemukakan oleh McDonald dan Lawton (dalam Ratminto dan Winarsih, 2005: 174) yaitu : Efisiensi dan Efektivitas.

A. Efisiensi

Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Efisiensi yang peneliti maksud adalah segala bentuk pelayanan oleh P2TP2A dalam melayani masyarakat dilihat dari perbandingan antara kasus yang telah dilaporkan dan kasus yang telah terselesaikan pada kasus kekerasan seksual.

Dalam UU nomor 23 tahun 2004, dijelaskan pada pasal 5 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. kekerasan seksual. Kekerasan seksual meliputi :

- a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Tindak kekerasan seksual merupakan kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan.

Adapun dasar hukum yang digunakan pada kasus kekerasan seksual tentang jaminan perlindungan, keamanan, dan kerahasiaan korban yaitu mengacu pada Undang- undang nomor 44 tahun 2008 pasal 4 tentang Pornografi adalah :

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang
 - b. Kekerasan seksual
 - c. Masturbasi atau onani
 - d. Ketelanjangan atau tampilan mengesankan ketelanjangan
 - e. Alat kelamin atau
 - f. Pornografi anak

2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi :

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Dari Undang-undang di atas, peneliti sulit menemukan korban yang bisa dijadikan key informan karena hal ini bersifat rahasia dan dilindungi oleh pemerintah.

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing melakukan upaya penyediaan unit pelayanan perempuan dan anak; penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban serta mendapat pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan atau bantuan hukum. Oleh karena itu proses pelayanan kasus kekerasan seksual harusnya diperlukan konsistensi secara maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap korban kasus kekerasan seksual secara baik dan maksimal sehingga dapat menekan angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai yang semakin meningkat.

Berikut adalah Rekapitulasi Formulir Register Pelayanan Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tahun 2013- 2015:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Formulir Register Pelayanan
Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

No	Nama Unit Pelayanan	Kasus Baru Berulang Rujukan	Bentuk Kekerasan					Jenis Pelayanan yang Diberikan				
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Penelantaran	Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi sosial	Penegakan & Bantuan Hukum	Pemulangan & Reintegrasi
1	PPA Polres Sinjai	Baru	-	4	3	-	-	23	-	3	1	-
		Berulang	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kejaksaan Negeri Sinjai	Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Berulang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengadilan Negeri Sinjai	Baru	10	-	-	-	-	12	-	-	4	-
		Berulang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	Baru	10	0	3	0	0	35	0	3	5	0
		Berulang	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		Rujukan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Sekunder P2TP2A Tahun 2013

Berdasarkan data di atas, terdapat tiga kasus kekerasan seksual yang baru yaitu pemerkosaan terhadap perempuan dewasa. Dari tiga kasus tersebut, prosedur pelayanan yang dilakukan yaitu awalnya perwakilan dari korban melaporkan kejadian kepada P2TP2A secara langsung pegawai melakukan wawancara kepada korban, dan setelah melakukan analisis kebutuhan korban pegawai meminta persetujuan untuk melakukan tindakan rujukan, dimana pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa rehabilitasi sosial dan bantuan hukum yang kemudian diselesaikan ke PPA Polres Sinjai selama proses penyelesaian kasus kurang lebih 6 bulan.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Formulir Register Pelayanan
Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

No	Nama Unit Pelayanan	Kasus Baru Berulang Rujukan	Bentuk Kekerasan					Jenis Pelayanan yang Diberikan				
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Penelantaran	Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi sosial	Penegakan & Bantuan hukum	Pemulangan & Reintegrasi
1	PPA Polres Sinjai	Baru	15	4	2	-	-	23	-	3	-	-
		Berulang	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kejaksaan Negeri Sinjai	Baru	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Berulang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengadilan Negeri Sinjai	Baru	10	-	-	-	-	12	-	-	4	-
		Berulang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	Baru	35	0	2	0	0	35	0	3	5	0
		Berulang	-	0	1	0	0	1	0	0	0	0
		Rujukan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Sekunder P2TP2A Tahun 2014

Berdasarkan data di atas, terdapat satu kasus kekerasan seksual yang berulang dan dua kasus kekerasan seksual yang baru yaitu berupa pelecehan seksual terhadap anak. Dari tiga kasus tersebut, prosedur pelayanan yang dilakukan yaitu awalnya perwakilan dari korban melaporkan kejadian kepada P2TP2A secara langsung pegawai melakukan wawancara kepada korban, dan setelah melakukan analisis kebutuhan korban pegawai meminta persetujuan untuk melakukan tindakan rujukan, dimana pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa rehabilitasi sosial dan bantuan hukum yang kemudian diselesaikan ke PPA Polres Sinjai selama proses penyelesaian kasus kurang lebih 3 bulan.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Formulir Register Pelayanan
Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

No	Nama Unit Pelayanan	Kasus Baru Berulang Rujukan	Bentuk Kekerasan					Jenis Pelayanan yang Diberikan				
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Penelantaran	Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi sosial	Penegakan & Bantuan hukum	Pemulangan & Reintegrasi
1	PPA Polres Sinjai	Baru	14	3	-	-	-	18	-	3	-	-
		Berulang	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kejaksaan Negeri Sinjai	Baru	14	3	-	-	-	16	-	-	-	-
		Berulang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengadilan Negeri Sinjai	Baru	3	-	11	-	-	18	2	2	7	-
		Berulang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	Baru	31	6	11		0	42	2	5	7	0
		Berulang	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		Rujukan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Sekunder P2TP2A Tahun 2015

Berdasarkan data di atas, terdapat sebelas kasus kekerasan seksual yang baru yaitu berupa pelecehan seksual terhadap anak. Dari kasus tersebut, prosedur pelayanan yang dilakukan yaitu awalnya kerabat korban melaporkan kejadian kepada P2TP2A pegawai melakukan wawancara kepada korban, dan setelah melakukan analisis kebutuhan korban pegawai meminta persetujuan untuk melakukan tindakan rujukan, dimana pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan dan bantuan hukum yang kemudian diselesaikan ke Pengadilan Negeri Sinjai. Kemudian satu kasus kekerasan seksual diselesaikan di P2TP2A dengan mengembalikan korban ke rumah orang tua korban dan selama proses penyelesaian kasus kurang lebih 6 bulan.

. Dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing melakukan upaya penyediaan unit pelayanan perempuan dan anak; penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban, oleh karena itu proses pelayanan kasus kekerasan seksual harus diperlukan konsistensi secara maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap korban kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai yang semakin meningkat, seperti tanggapan dari Kepala Unit PPA Polres:

“selama ini kami melakukan koordinasi dengan P2TP2A, jika ada korban yang membutuhkan perlindungan hukum ataupun pengamanan terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan” (wawancara 16 April 2016)

Hal ini ditambahkan oleh Konselor P2TP2A:

“seluruh kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke P2TP2A Kabupaten Sinjai sudah selesai. Salah satu kasus yang baru-baru ini telah diselesaikan dengan memberikan pelayanan kesehatan, dan dibawa ke psikiater makassar karena trauma yang pernah dialami.” (wawancara 16 April 2016)

Kemudian dipertegas oleh Kepala Bidang P2TP2A:

“Dari kasus kekerasan seksual yang sudah ditangani, target penyelesaian kasus yaitu 6 bulan sampai 1 tahun. Selama penyelesaian kasus kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Sinjai ini tidak ada yang melebihi dari 1 tahun” (wawancara 16 April 2016)

Pada prakteknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sinjai sudah melakukan pelayanan dengan memenuhi target . Dan dalam memberikan konseling kepada klien P2TP2A haruslah memberikan kenyamanan bagi korban dalam menyampaikan masalahnya, membantu mereka

agar sanggup menghadapinya sehingga mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya. Berikut salah satu hasil wawancara dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual oleh Konselor pertama P2TP2A:

“salah satu kasus pemerkosaan anak sekolah yang sudah tidak diterima lagi di tempat ia bersekolah namun ingin mengikuti UN, kami dari P2TP2A membantu korban dengan mengikutkan kembali dalam UN.”(wawancara 17 April 2016)

Hal ini ditambahkan oleh konselor kedua P2TP2A yang pada saat itu ikut penjangkauan ke korban:

“pada kasus pemerkosaan di kecamatan Sinjai Timur, dari Imam desa setempat ingin menikahkan pelaku dengan korban, namun hal ini dibantah oleh P2TP2A jika cara tersebut tidak akan menjamin kebahagiaan si korban. Oleh karena itu, dari pihak P2TP2A menyarankan untuk menempuh dengan jalur hukum saja”(wawancara 17 April 2016)

Dari data dan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya sudah berjalan efisien karena seluruh kasus kekerasan seksual dari tiga tahun terakhir sudah diselesaikan dengan memenuhi target penyelesaian kasus yaitu paling lama selama satu tahun. Dengan memberikan pelayanan pengaduan dan pendampingan rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.

B. Efektivitas

Efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi pada kekerasan seksual. Dengan perkataan lain efektivitas adalah hasil guna yang dicapai oleh organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuannya. Indikator efektivitas dalam

mengukur kinerja organisasi dapat dilihat dari program dan peran yang dijalankan oleh P2TP2A pada kasus kekerasan seksual

a. Program

Dalam peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sinjai, perlu ditunjang dengan program yang jelas, terarah dan berkesinambungan. Rencana kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target- targetnya berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2013- 2018 :

Tabel 4.5
Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak

PROGRAM	KEGIATAN
Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none">➤ Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok Perempuan➤ Penguatan dan Pengembangan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak➤ Fasilitasi P2TP2A

Sumber: P2TP2A Kabupaten Sinjai

Pelaksanaan Kegiatan

1. Melaksanakan sosialisasi keberadaan P2TP2A di 9 (Sembilan) Kecamatan
2. Melaksanakan pendampingan dan penjangkauan kasus bekerjasama LBH Apik Makassar
3. Melaksanakan rapat koordinasi pengurus P2TP2A

4. Mengikuti magang bagi pengelola P2TP2A di Surabaya
5. Mengikuti Pelatihan tenaga layanan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Mengikuti pelatihan tenaga bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
7. Melaksanakan penanganan Pelayanan Pengaduan yang telah diterima di P2TP2A

Maka karena hal tersebut disusun dan ditetapkan dengan keputusan ketua P2TP2A Kabupaten Sinjai. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum P2TP2A:

"Program umum P2TP2A Kabupaten Sinjai, dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh anggota dan relawan P2TP2A Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kegiatan setiap tahunnya."(wawancara 18 April 2016)

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang P2TP2A:

" Dalam menjalankan tugasnya P2TP2A mengacu pada SK program umum yang telah disusun, contohnya dalam hal kegiatan pelayanan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh divisi pengaduan dan pendampingan".(wawancara 18 April 2016)

Selanjutnya agar penjabaran dan pelaksanaan program umum P2TP2A senantiasa dapat dikembangkan dalam bentuk program kerja yang inti program maupun materinya disesuaikan dengan kondisi, situasi dan urgensi yang berkembang pada setiap tahunnya. Maka P2TP2A terbagi dalam 5 divisi yaitu: Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum, Divisi Pengaduan dan Pendampingan, Divisi Kesehatan dan Konseling, Divisi Bidang Kerjasama dan Pengembangan, Divisi Rehabilitasi, Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi. Kegiatan per divisi tersebut sudah sangat jelas apa yang

akan dilaksanakan oleh P2TP2A. Untuk kasus kekerasan seksual sendiri sudah dilakukan upaya dalam mencegah kekerasan seksual. Seperti yang telah dikemukakan oleh Kepala Bidang P2TP2A:

“sejak terbentuknya kepengurusan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sinjai kegiatan yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yaitu sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.(wawancara 20 April 2016)

Hal tersebut dipertegas oleh Sekretaris P2TP2A yang mengatakan bahwa:

“P2TP2A bersama Diknas turun ke sekolah- sekolah untuk memberikan pencerahan secara dini mengenai keagamaan karena moral dan akhlak merupakan pondasi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual” (wawancara 20 April 2016)

Sesuai dengan pendapat dari dua hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sinjai sudah berjalan dengan efektif, dimana program kerja dalam pencegahan kasus kekerasan seksual sudah dijalankan.

b. Peran

Peran dalam menangani kasus kekerasan seksual, peran P2TP2A Kabupaten Sinjai adalah dari untuk dan oleh masyarakat, dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual telah melakukan program sosialisasi Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang- Undang No. 35 tahun

2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, P2TP2A dengan melakukan pendampingan klien atas kasus- kasus yang menyimpannya, baik pendampingan penyelesaian tindakan hukum kepada pihak- pihak terkait serta di lembaga peradilan, yaitu pengadilan, kejaksaan, serta pendampingan medis di rumah sakit dan memberikan konsultasi sosial, psikologis terhadap klien.

Dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang- Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat salah satu upaya yaitu perlindungan/ pendampingan terhadap korban kekerasan. Maksudnya, setiap perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya membuat pengaturan yang mengatur agar tidak terjadi kekerasan seksual, tetapi dalam kenyataannya kekerasan seksual tetap ada dan makin meningkat di Kabupaten Sinjai. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat anatara lain tentang keberadaan P2TP2A yang ada di Kabupaten Sinjai, jenis pelayanan yang tersedia serta fasilitas yang dimilikinya.

Kegiatan sosialisasi dianggap penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pelayanan, upaya pengadaan sarana dan prasarana, serta kehidupan semua pihak yaitu; masyarakat sebagai klien yang memanfaatkan wahana untuk memperoleh pelayanan agar senantiasa siap untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Masyarakat keseluruhan yang senantiasa memelihara dan mengembangkan tempat pelayanan menjadi asset bersama. P2TP2A Kabupaten Sinjai telah melakukan sosialisasi di 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang P2TP2A :

“kami telah mensosialisasikan P2TP2A di 9 kecamatan dan tahun ini akan diadakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”(wawancara 21 April 2016)

Dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual P2TP2A telah melakukan program sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pelayanan kasus kekerasan seksual P2TP2A dengan melakukan pendampingan klien atas kasus- kasus yang menyimpannya, baik pendampingan penyelesaian tindakan hukum kepada pihak- pihak terkait serta di lembaga peradilan, yaitu pengadilan, kejaksaan serta pendampingan medis dirumah sakit dan memberikan konsultasi baik sosial, psikologis. Permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini diwarnai kecenderungan peningkatan kompleksitas yang bersumber dari masalah- masalah keterbelakangan, ketertinggalan serta masalah kemiskinan sehingga perlu ditangani oleh pemerintah bersama- sama dengan masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan

oleh P2TP2A Kabupaten Sinjai sudah dilakukan di 9 kecamatan, namun belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dibuktikan kepada beberapa masyarakat yang ditemukan oleh peneliti belum mengetahui lokasi dari P2TP2A. Hal ini dikatakan oleh salah satu koban yang tidak melapor Az:

“saya bingung mau melaporkannya kemana karena saya juga masih takut karena ini merupakan aib keluarga, jadi saya masih malu melaporkannya”(wawancara 22 April 2016)

Hal ini diperkuat oleh korban yang tidak melapor Ti:

“saya tidak tau keberadaan P2TP2A kalau tidak diberitahu oleh adik mahasiswa”(wawancara 22 April 2016)

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat atau korban pelecehan seksual yang tidak mengetahui keberadaan P2TP2A yang merupakan tempat pengaduan bagi korban kekerasan seksual. Padahal sebelumnya dari pernyataan pegawai P2TP2A telah ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. Namun berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak korban, diketahui bahwa korban sendiri yang tidak berkenan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya kepada pihak yang berwajib dengan alasan kasus yang dialaminya masih tergolong ringan dan tidak begitu serius. Di samping itu, pelecehan seksual yang dialami juga menimbulkan rasa malu karena takut menceritakan aib kepada orang lain.

Selain itu, sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam menjalankan peran P2TP2A di Kabupaten Sinjai. Sebab kualitas pegawai tercermin dari keahlian yang dimiliki oleh para pegawai tersebut. Dalam menjalankan tugasnya para pengurus harus dapat memahami tentang pekerjaannya. Oleh karena itu, beban pekerjaannya tersebut harus disesuaikan dengan visi dan misi dari P2TP2A. Sehingga target kuantitas pekerjaannya dapat tercapai. P2TP2A dituntut untuk memiliki pengurus dan relawan yang ahli dalam bidang- bidang tertentu yang berhubungan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. P2TP2A dalam menjalankan peranannya belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang terbatas dan pemahaman peran dari instansi terkait masih kurang. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris P2TP2A sebagai berikut:

"kami sudah melakukan koordinasi dengan baik ke Polres, Rumah sakit namun yang masih banyak bergerak itu masih dari kami. Hal ini disebabkan SDM yang terbatas dan pemahaman dari peran sektor-sektor terkait masih kurang. Karena dari kementerian Perempuan sendiri masih sangat terbatas kegiatan- kegiatan yang mengarah kepada peningkatan SDM, dan yang menjadi harapan kami adalah bagaimana supaya SDM yang membidangi terus diberikan dorongan, dibina dalam memberikan pemahaman bagaimana menjalankan peran sesungguhnya dari P2TP2A. Karena sesungguhnya P2TP2A ini adalah lembaga yang sangat memberikan banyak bantuan terutama kepada keluarga tidak mampu, karena segala sesuatunya tidak ada pungutan biaya dari pelayanan kasus.(wawancara 23 April 2016)

Fenomena tersebut sebagai gambaran peran yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sinjai belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dari P2TP2A serta sumber daya manusia dari pengelola lembaga masih terbatas dan pemahaman dalam menjalankan

perannya masih kurang. Maka dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak belum berjalan dengan efektif

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang mana dilihat dari dua indikator sebagai berikut:

1. Efisiensi

Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari segi efisiensi dalam menjalankan tugasnya sudah berjalan efisien karena seluruh kasus kekerasan seksual dari tiga tahun terakhir sudah diselesaikan dengan memenuhi target penyelesaian kasus yaitu paling lama selama satu tahun. Dengan memberikan pelayanan pengaduan dan pendampingan rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.

2. Efektivitas

Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari segi efektivitas terbagi atas dua indikator yaitu program dan peran yang dijalankan oleh P2TP2A .

Pertama, program. Dari penjabaran program P2TP2A Kabupaten Sinjai yang diuraikan melalui kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A selama kurun waktu P2TP2A Kabupaten Sinjai terbentuk sudah menjalankan program kerja dengan efektif. Dapat dilihat dari sosialisasi

undang- undang yang telah diberikan ke masyarakat, dan pencerahan ke sekolah- sekolah.

Kedua, peran. Peran P2TP2A terhadap kasus kekerasan seksual telah melakukan sosialisasi undang- undang di masyarakat dan sekolah- sekolah namun belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dari P2TP2A serta sumber daya manusia dari pengelola lembaga masih terbatas dan pemahaman dalam menjalankan perannya masih kurang. Maka disimpulkan bahwa peran dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak belum berjalan dengan efektif.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi P2TP2A Kabupaten Sinjai khususnya untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan secara maksimal.

Adapun saran- saran tersebut yaitu:

- c. Melakukan sosialisasi lebih intensif tentang program dan kegiatan kepada segenap lapisan masyarakat dengan memasang spanduk, baligho, di tempat atau titik yang strategis. Membentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi untuk dapat lebih menjangkau ketingkat korban kekerasan seksual yang tidak melapor.
- d. Melakukan pertemuan informal seperti acara seminar, kegiatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat secara berkala. Pertemuan tersebut dilakukan agar program- program yang telah

tersusun dapat dipahami oleh masyarakat. Memberikan pengarahan dan pemahaman tentang program dan kegiatan secara intens kepada semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amins, Achmad. 2012. **Manajemen Kinerja pemerintah Daerah**. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Abdul Wahid & Muhammad Irfan 2011 **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan**. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Bastian, 2001. **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia**, BPFE, Yogyakarta.
- Dharma, Agus, 1991. **Manajemen dan Prestasi Kerja**. Jakarta: Rajawali Press
- Fahmi, Irham. **Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi**. Bandung: Alfabeta
- Hariandja, Marihot T. E, 2002. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Grasindo
- Keban, Yermias. 2006. **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu**. Yogyakarta: Gaya Media
- Kusdi, 2011. **Teori Organisasi dan Administrasi**. Jakarta : Salemba Humanika
- Prasetya Irawan, **Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu- Ilmu Sosial**, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2013. **Manajemen Pelayanan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rivai Veitzel. 2004. **Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Steers, Richard. 1985. **Efektivitas Organisasi**. Jakarta: Erlangga
- Sutrisno, Edy. 2011. **Budaya Organisasi**. Jakarta : Kencana

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang- Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang- Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang- undang nomor 44 tahun 2008 pasal 4 tentang Pornografi

Jurnal:

Winda Khairuddin. 2013. Studi Tentang Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Odah Etam Kaltim Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmu Administrasi Fisip Unmul

Website:

www.kekerasanseksual.komnasperempuan.or.id

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf>

[.\(www.Lakip.do.am/blog/indikator_kinerja_utama_iku/2010-11-11-2\)](http://www.Lakip.do.am/blog/indikator_kinerja_utama_iku/2010-11-11-2)

www.komnasperempuan.or.id>2015/02

L

A

M

P

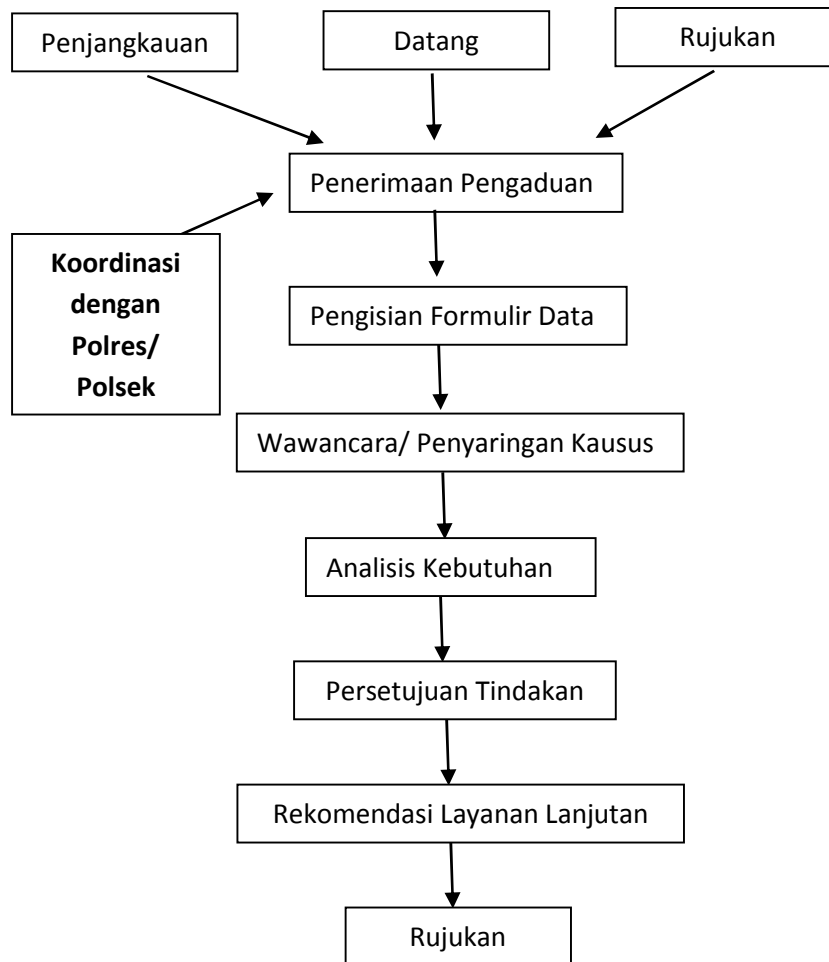
I

R

A

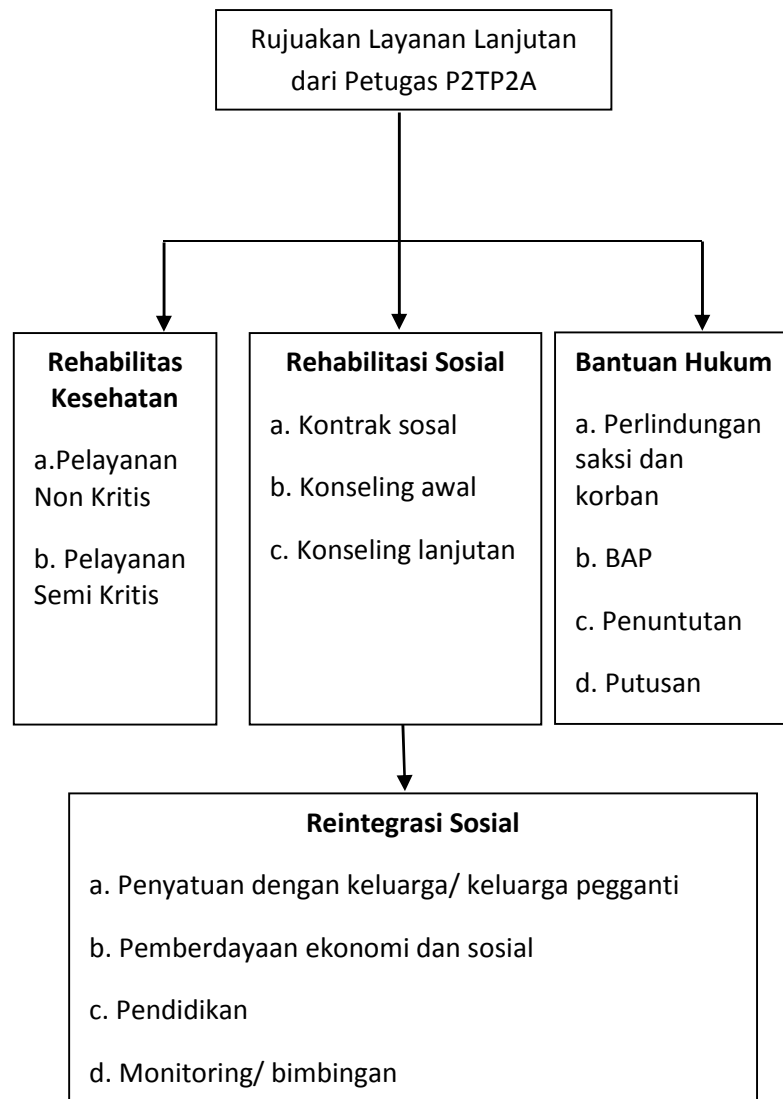
N

Pelayanan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan



Sumber: P2TP2A Kabupaten Sinjai

Pelayanan Rujukan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan



Sumber: P2TP2A Kabupaten Sinjai



Keterangan: Wawancara dengan pegawai P2TP2A



Keterangan: Wawancara dengan Kanit PPA Polres Kabupaten Sinjai



Keterangan: salah satu korban melapor di P2TP2A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nur Rizkah. S
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 26 September 1993
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sahabat 1, No. 4
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku/Bangsa : Bugis / Indonesia
Status : Belum Menikah
Nomor Handphone : 085 345 315 068



DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Selle, S. Pdi
Nama Ibu : Hasnah, S. Sos
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Jl. Bulu Lasiai
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

RIWAYAT PENDIDIKAN

2000 – 2006 : SDN 3 Sinjai Utara
2006 – 2009 : SMP Negeri 3 Sinjai Utara
2009 – 2012 : SMA Negeri 1 Sinjai Utara